

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TENTANG JUAL BELI PLAT  
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E) Jurusan Ekonomi Islam  
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**ADRIANSYAH ARIFIN. S**

NIM: 10200113180

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adriansyah Arifin. S  
NIM : 10200113180  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 12 Juni 1995  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam  
Alamat : BTN Saumata Indah Blok N1 No. 4  
Judul : Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat  
Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Februari 2018

Penyusun,



**ADRIANSYAH ARIFIN. S**  
**10200113180**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Makassar**”, yang disusun oleh saudara **Adriansyah Arifin. S**, NIM : 10200113180, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 23 Maret 2018, bertepatan dengan 6 Rajab 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Samata, 4 April 2018 M.  
18 Rajab 1439 H

#### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Syaharuddin, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Emily Nursaidy, SE., ME.	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis persembahkan keharibaan Allah Rabbul Alamin, zat yang menurut Al-Qur'an kepada yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmat Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari lumpur jahiliyah, menuju kepada peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul **“Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan di Kota Makassar”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sejak awal terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suwaedi Paserangi dan Ibunda Nanti Yaqub yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H.Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag, selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Thamrin Logawali, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, S.E., M.Si, selaku pembimbing I dan Ibu Emily Nursaidy, S.E., M.E, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
6. Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf jurusan Akuntansi UIN alauddin Makassar.



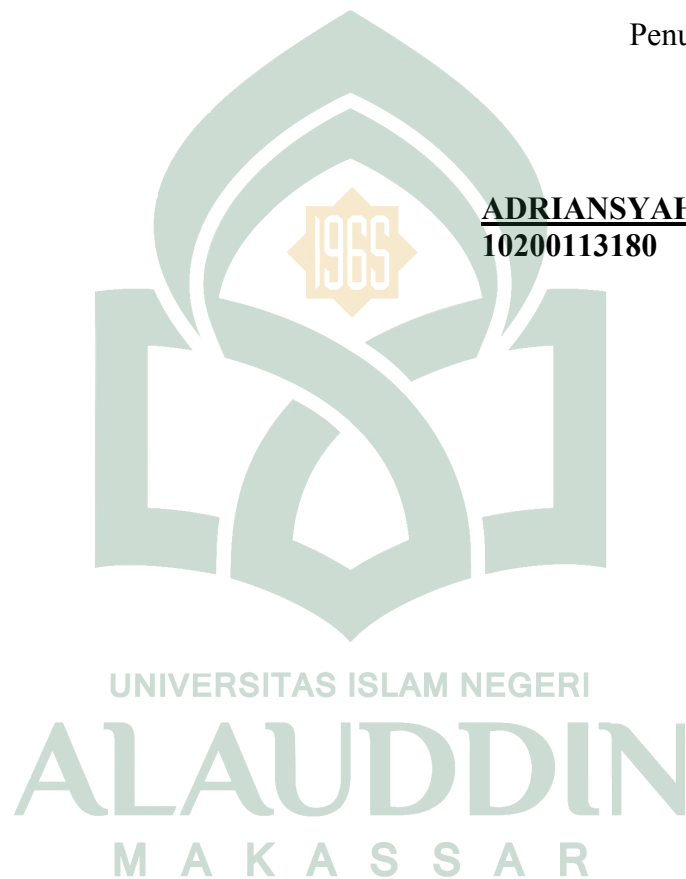
7. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2013 terkhusus untuk ekonomi Islam D, terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini dan telah menjadi teman yang hebat bagi penulis.
8. Seluruh teman-teman KKN angkatan 54, terkhususnya di daerah Soppeng kec. Lilirilau terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar, Kakak-kakak maupun adik-adik tercinta, terimakasih atas persaudaraannya.
10. Teruntuk sahabat-sahabatku Rika Musriani, Amri, Husni Mubaraq, Andi Ahmad Maulana, Andi Muh. Arham, Nurwulandari Diah, Nuradilah Adnan, Muhammad Awal, Erviani, Dwi Monica, Adnan Ghazali, Umar Rahman, Irmha Juliandira, terima kasih atas semangat, do'a dan untuk kebersamaan kita yang luar biasa, semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik.
11. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarja Akuntansi pada UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnnya dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah

adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis,

**ADRIANSYAH ARIFIN. S**  
**10200113180**



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-11</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus penelitian dan Deskripsi fokus .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>12-37</b>
A. Jual Beli Dalam Tinjauan Islam.....	12
1. Pengertian jual beli.....	12
2. Dasar hukum jual beli.....	15
3. Rukun dan syarat jual beli.....	17
4. Macam-macam jual beli.....	22
5. Etika jual beli.....	26
B. Plat Nomor Kendaraan Bermotor .....	33
1. Pengertian Plat Nomor.....	33
2. Macam-macam Plat Nomor .....	35
C. Kerangka Pikir .....	37
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38-45</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Waktu dan lokasi Penelitian.....	38
C. Pendekatan Penelitian .....	39
D. Jenis dan Sumber data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data .....	40
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
H. Pengujian Keabsahan Data.....	45



<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47-80</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
B. Jual Beli Plat Nomor Kendaraan di Kota Makassar.....	59
C. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan di Kota Makassar .....	69
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>81-82</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83-85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka pikir.....	35
----------------------------------	----



## ABSTRAK

**Nama : Adriansyah Arifin. S**  
**Nim : 10200113180**  
**Judul : Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan di Kota Makassar**

---

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pandangan ekonomi Islam tentang jual beli plat nomor kendaraan di kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang jual beli plat nomor kendaraan bermotor di kota Makassar. Dan untuk mengetahui proses jual beli nomor kendaraan bermotor di kota Makassar.

Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan, yang merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertempat di Makassar, alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena di kota Makassar jual beli plat nomor marak dilakukan dengan bebas tanpa adanya larangan atau peraturan yang ditegaskan oleh pemerintah. Menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan Normatif dan sosiologi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta dilengkapi dengan data atau dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli plat nomor di Makassar merupakan bentuk usaha yang cukup membantu pemilik kendaraan. Plat nomor adalah bagian identitas kendaraan yang wajib digunakan sesuai undang-undang. Pihak kepolisian menjadi lembaga yang berhak atas keberadaan plat nomor tersebut. Pelaksanaan akad jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Makassar sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, baik dari segi *al-‘āqidāni*, *al-Ma‘qūd‘alaih* maupun *ṣiġhat al-‘aqd*. Adapun pada prakteknya terbagi dalam dua hal. Pertama, jual beli plat nomor yang diperbolehkan dengan catatan harus sesuai dengan identitas kendaraan bermotor. Kedua, jual beli plat nomor yang dilarang karena mengandung unsur pemalsuan.

***Kata kunci:*** hukum Islam, jual beli, plat nomor.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Aktivitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir dimuka bumi. Namun seiring berjalannya waktu aktivitas ekonomi terus mengalami perubahan. Salah satunya yaitu praktek jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>1</sup>

Sedangkan jual beli menurut hukum islam yaitu menukar satu barang dengan barang lain dan dilakukan dengan cara tertentu.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum islam dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.<sup>3</sup> Disisi lain untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi

---

<sup>1</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 79.

<sup>2</sup>R. Abdul Djamili, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 146.

<sup>3</sup>Dimajuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 57.

rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya sighat berupa ijab kabul.<sup>4</sup>

Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci dan bisa diambil manfaatnya serta pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh dan merdeka. Hal ini memperjelas bahwa segala bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dilarang oleh Syariah.

*Gharar* sendiri meliputi banyak hal seperti menyembunyikan informasi tentang harga, model, ukuran, sifat, kualitas barang. Sehingga konsumen terkecoh dan menyebabkan kerugian. Selain itu, hukum islam memberi solusi sebagai pelengkap daripada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa khiyar.

*Khiyar* adalah hak pilih diantara pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Perlu diketahui bahwa mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.

Sedangkan jual beli dalam sistem perdagangan yang dinyatakan oleh Islam ialah usaha yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang memuat nilai-nilai moral dan kemaslahatan sesama manusia seperti bukan seperti di Negara-negara kapitalis dan sosialis yang hanya berdasar pada sisi materialis, yaitu menghalalkan segala cara untuk

---

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-islami adillatuh*, diterj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 28.

memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral dan kemaslahatan manusia.<sup>5</sup>

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi untuk keharmonisan hubungan masyarakat. Tiap-tiap kepentingan antar satu dengan yang lainnya ada yang bersama dan ada yang berlainan, bahkan ada juga yang bertentangan sehingga menyebabkan terjadinya bentrokan. Semua ini memerlukan perlindungan dan pengaturan, islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia.<sup>6</sup>

Tujuan hukum islam yang hendak dicapai dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat yaitu tidak lain hanya untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat sebagai inti pokoknya yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Keutamaan kepada dunia dan akhirat merupakan faktor penting yang membedakan hukum islam dengan hukum-hukum lain yang hanya berasaskan kepada kemaslahatan duniawi semata.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Abdul Mun'im Radi, "*Iqtisadiyyat at-Tijarah ad Dauliyyah*", diterj. Anshori Umar, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), h. 158.

<sup>6</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: C. V. Mulja, 1967), h. 05.

<sup>7</sup>Mohd Said Ishak, *Pelaksanaan Hukum Islam*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2002), h. 29.



Ahmad Ifham Sholihin mengutip gagasan Ibnu Taimiyah berkaitan dengan hukum islam. Menurut Ibnu Taimiyah syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, mengeliminasi dan mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik diantara beberapa maslahat dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil.<sup>8</sup> Selaku umat muslim dalam melakukan jual beli dituntut untuk memperhatikan norma dan aturan yang benar menurut hukum islam dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak dan dihalalkan atau tidak, agar tidak menganiaya dan memakan harta orang lain secara batil.<sup>9</sup>

Sebagai seorang pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik ataukah kurang layak untuk kita jual kepada *customer*. Kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu, kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada *customer*.

Keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penjual dalam perdagangan. Ketika jika tidak jujur, maka hal ini akan berdampak negatif bagi dirinya. Misalnya barang yang ia jual memiliki kualitas yang rendah, namun ia

---

<sup>8</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) 2010, h. 378.

<sup>9</sup>Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1986), h. 268.

mengatakatakan pada *customer* bahwa barang tersebut merupakan barang yang sangat bagus, hal ini dapat di katakan cacat etis atau cacat moral karena tidak sesuai dengan kondisi barang yang dibeli. Sebagai penjual yang baik seharusnya mereka mampu memberi tahu pada *customer* tentang cacat barang tersebut.

Suatu barang dikatakan cacat apabila barang tersebut tidak aman dalam penggunaan serta tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Pengertian cacat juga diatur dalam KUH Perdata, yaitu cacat yang “sungguh-sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat digunakan dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu atau cacat yang mengakibatkan “berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan yang semestinya.”<sup>10</sup> Sebagaimana Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah “memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyari’atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula”.<sup>11</sup> Oleh karena itu, hak tersebut wajib dilindungi.

Salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari hak kekayaan Intelektual. “hak cipta adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya,”<sup>12</sup> yang

---

<sup>10</sup>Salam, *Pengendalian Kualitas Pada-Produk Cacat* <http://estikoco.blogspot.co.id/2012/05/pengendalian-kualitas-pada-produk-cacat.html> (18 Oktober 2017)

<sup>11</sup>Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemhkan. Zainal Arifin, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 86.

<sup>12</sup>Undang-Undang HAKI, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), h. 4.

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta yang orisinal dan bermanfaat digolongkan sebagai harta yang sangat berharga. Salah satu negara yang dijadikan tempat peredaran barang-barang bajakan dan illegal yaitu negara Indonesia. Segala barang bajakan dan tiruan dapat ditemukan dengan mudah di negeri ini.

Negara Indonesia merupakan salah satu pusat perniagaan aneka produk bajakan/palsu. Seperti: barang elektronik, buku, kaset musik, film, *software*, hingga obat sekalipun dijual bebas. Tak heran, jika Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggaran terbesar hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar. Langkah penertiban dan penindakan kerap dilakukan. Nyatanya, praktik pembajakan masih tetap saja dilakukan.

Secara yuridis, negara Indonesia merupakan negara yang cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang. Khususnya Tentang Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya UU hak cipta (UUHC) No.6 tahun 1982 mengatur tentang Hak Cipta. Saat ini pengaturan tentang hak cipta dapat kita temukan dalam Undang-Undang yakni : UU No.19 tahun 2002 mengatur tentang Hak Cipta, UU No.29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No.30 tahun 2000 tentang Rahasia

Dagang, UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No.14 tahun 2001 tentang Paten dan UU No.15 tahun 2001 tentang Merek.<sup>13</sup>

Obyek yang diperjualkan dan keberadaan usaha jual beli plat nomor palsu lebih menitik beratkan dalam hal memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral, etika, kemaslahatan manusia dan mengabaikan hak cipta. Sedangkan, dalam menggunakan plat nomor modifikasi atau palsu itu tidak dianjurkan oleh pihak kepolisian.

Adanya undang-undang yang mengatur ternyata belum mampu menyelesaikan masalah. Fenomena ini terjadi disalah satu tempat yang ada di kota Makassar yaitu, di pinggir jalan Veteran Selatan. Sebagaimana yang terlihat bahwa ditempat tersebut banyak penjual plat nomor modifikasi/palsu dipinggir jalan.

Salah satu konsumen berkata bahwa “banyak orang yang termotivasi untuk mengganti angka plat nomor asli yang sesuai dengan keinginannya. Namun mereka yang tidak ingin berurusan dengan kantor Samsat. Mereka lebih tertarik untuk membeli plat nomor palsu di luar kantor Samsat khususnya di kota Makassar, karena plat nomor yang dijual di luar kantor Samsat lebih mudah diperoleh.”<sup>14</sup>

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan di Kota Makassar”**.

---

<sup>13</sup>Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 223.

<sup>14</sup>Amri, (23 Tahun), Pembeli plat nomor, wawancara, Makassar tanggal 26 Oktober 2017

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bertujuan untuk memperjelas maksud dari peneliti pada sebuah karya ilmiah yang terkandung dalam judul karya ilmiah tersebut, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya, maka penelitian ini difokuskan pada penjual plat nomor yang melakukan penjualan plat nomor kendaraan di kota Makassar.

### **2. Deskripsi Fokus**

Deskripsi fokus dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan fokus penelitian. Sehingga deskripsi fokus bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan islam mengenai penjualan plat nomor palsu di Kota Makassar.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang, maka masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses jual beli plat nomor kendaraan bermotor di kota Makassar?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang jual beli plat nomor kendaraan di kota Makassar?

#### **D. Kajian Pustaka**

Adapun hasil studi empiris yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan diharapkan dapat lebih mempertajam dan memperkuat rumusan kerangka pikir. Adapun kajian pustaka yang dimaksud antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Agus Taufik) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa plat nomor yang sesuai TNKB di perbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan. Islam memperbolehkan jual beli yang mengandung asas manfaat dan kemaslahatan, sedangkan jual beli plat nomor palsu dilarang karena mengandung unsur pemalsuan.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh (Juma'in) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent” (Praktik jual beli sepeda motor di PT. Karang Gede Motor-Boyolali) Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Skripsi ini membahas mengenai tujuan hukum Islam terhadap Pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem indent.

---

<sup>15</sup>Muhammad Agus Taufik, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta*”,*Skripsi*, ( Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).



Sehingga praktek jual beli plat nomor dikaitkan dengan undang-undang berlalu lintas dan dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam yang berlaku.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh (Qorry Tilawah Muslim) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Onderdil Bekas di Pasar Klithikaan Pakuncen Yogyakarta” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Skripsi tersebut membahas tentang pandangan Islam terhadap praktik jual beli di Pasar Klithikaan Pakuncen Yogyakarta.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh (Mursito Adi Sudarsono) dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penerbitan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Tidak Resmi di DIY. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peran dan tindakan pihak kepolisian lalu lintas Polda DIY dalam menanggulangi pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan yang Tidak Resmi di DIY.<sup>18</sup>

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang jual beli plat nomor kendaraan Bermotor di kota Makassar.

---

<sup>16</sup>Juma'in, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent”*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>17</sup>Qorry Tilawah Muslim, *“Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta”*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2011).

<sup>18</sup>Mursito Adi Sudarsono, *“Peran Kepolisian Dalam Penerbitan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Tidak Resmi di DIY”*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 2009).

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Praktisi**

1. Sebagai bahan acuan bagi kepala kepolisian Republik Indonesia untuk lebih memperketat peraturan terkait masalah pembuatan plat nomor.
2. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sehubungan dengan masalah yang sama.

### **b. Kegunaan Ilmiah**

Untuk memperluas wawasan khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi islam terkait masalah pembelian plat nomor.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Jual Beli dalam Tinjauan Islam*

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Di dalam hukum islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian/perikatan atau '*aqd*' dalam bahasa Arab. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.<sup>19</sup>

Secara linguistik jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.<sup>20</sup> Secara istilah menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan dengan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *shighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.44.

<sup>21</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqhi Muamalah*, h. 69.

Menurut Abdul Azhim bin Badawi dalam bukunya mengatakan bahwa kata *buyu'* berarti jual beli. Sering dipakai dalam bentuk *jama'* karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya. Sedangkan *bai'* secara istilah ialah pemindahan hak milik dari satu orang ke orang lain dengan imbalan harga. Adapun *syira'* (pembelian) adalah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual). Dan seringkali masing-masing dari dua kata tersebut (*bai'* dan *syira'*) diartikan sebagai jual beli.<sup>22</sup> Sejalan dengan pemikiran Abdul Azhim, Muhammad Taufiq Ramadhan juga menyebutkan bahwa kata *bai'* dan *syira'* memang memiliki satu makna, yaitu jual beli. Seperti firman Allah SWT pada QS Yusuf/12:20, yaitu:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ خَسِيفٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahannya :

“Dan mereka menjual (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya”.<sup>23</sup>

Kata “*wa syarawhu*” pada ayat di atas mempunyai makna “mereka menjualnya”. Demikian pula untuk definisi jual beli secara terminologi, yaitu adanya tukar menukar antara harta dengan barang atau jasa oleh si pembeli dan penjual dalam satu transaksi.

Secara bahasa, *bai'* adalah *al-mubadalah* (pertukaran), kata *al-bai'* mempunyai makna yang sama dengan kata *al-syira'*. Dua kata ini termasuk dalam

<sup>22</sup>Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*, diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil, (Cet. III Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), h.649.

<sup>23</sup>Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya* ( Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002). h. 189.

kategori *al-alfadh al-musyarakah baina al-ma'ani al-mutadladah*. Sama seperti Muhammad Taufiq, Hasan Ayyub juga menyebutkan contoh yang sama, yaitu dengan menyebutkan surah Yunus ayat 20 dalam hal persamaan makna antara *bai'* dan *syira'*. Secara terminologi beliau berpendapat bahwa *bai'* berarti adanya pertukaran harta dengan harta dengan adanya keridhaan atau saling suka oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Disebutkan juga bahwa *bai'* berarti jual beli atau pertukaran barang dengan harga, contohnya seperti baju dengan beberapa dinar. Sedangkan untuk transaksi barter atau pertukaran barang dengan barang biasa disebut *bai' muqayadlah*.<sup>24</sup>

Jual beli secara etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bai'* yang berarti jual beli adalah termasuk dalam kata yang mempunyai makna ganda yang berseberangan (*bai'* dan *syira'*), yang berarti bahwa makna *bai'* juga memiliki makna *syira'*, maka baik kata *bai'* maupun kata *syira'* sama artinya.<sup>25</sup> Secara terminologi, Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

*Mal* (harta dan barang) menurut ulama Hanafi adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan.

---

<sup>24</sup>Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, 2006), h.7.

<sup>25</sup>Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.

Sedangkan standar sesuatu itu disebut *mal* adalah ketika seseorang bisa memperkaya diri dengan *mal* tersebut. Prof. Ahmad Musthafa al-Zarqa mengkritik definisi *mal* di atas, lalu menggantinya dengan definisi lain, yaitu bahwa *mal* adalah semua barang yang memiliki nilai material. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dari hak-hak tidak termasuk dalam kategori *mal* (harta). Sedangkan menurut mayoritas ulama fiqih, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Alasannya adalah bahwa tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkan.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminalogi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau ijarah yang objeknya berupa mamfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dai masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual bei tidak sah.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin.

---

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu, al-juz al-khamis* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), H. 3304-3306.



Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma' yakni :

a. Al Qur'an. Firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah/2 : 282<sup>27</sup>

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Terjemahannya :

... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ...

b. Sunnah

Maksud mabrur dalam hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Jual-beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang.<sup>28</sup> Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah:<sup>29</sup>

- 1) Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang);
- 2) *Money charger* (pertukaran mata uang);
- 3) Jual beli kontan (langsung dibayar tunai);
- 4) Jual beli dengan cara mengangsur (kredit);

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Trjemah*, h. 37.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010), h. 179.

<sup>29</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

- 5) Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam). Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah Allah SWT. telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya.

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Adapun dasar hukum jual beli, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Mubah, merupakan hukum asal jual beli;
- b. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang;
- c. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang

---

<sup>30</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 67.

harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada tiga macam, yaitu:

- a. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
- b. Objek akad (barang dan harga)
- c. Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)

Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa/4:29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>31</sup>

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, Judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu `Abbas

<sup>31</sup>Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemah*, h. 65.

tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itulah yang difirmankan oleh Allah: *laa ta’kuluu amwaalakum bainakum bil baathili*. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.<sup>32</sup>

Menetapkan rukun jual beli diantara para ulama terjadi perbedaan. Menurut Ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik ucapan maupun perbuatan. Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun jual beli, yaitu: Pihak penjual (*ba’i*) Pihak pembeli (*mustari*) Ijab Qabul (*Sighat*) Obyek jual beli (*Ma’qus alaih*).<sup>33</sup>

Adapun syarat jual beli menurut pandang ulama yaitu.<sup>34</sup> :

- a. Syarat jual beli menurut madzhab Hanafiyah. Dalam akad jual beli harus disempurnakan empat syarat, yaitu: Syarat In’iqad (dibolehkan oleh syar’i) Syarat Nafadz (harus milik pribadi sepenuhnya) Syarat Umum (terbebas dari cacat) Syarat Luzum (Syarat yang membebaskan dari khiyar)
- b. Syarat jual beli menurut madzhab Malikiyah merumuskan 3 macam syarat jual beli, yaitu: Aqad, Sighat, Obyek Jual Beli.

---

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.70.

<sup>33</sup>Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinargrafika, 2012), h. 140.

<sup>34</sup>Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Impementasisnya Pada Sektor Keuangan Syaria* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 65.

- c. Syarat jual beli menurut madzhab Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan jual beli, yaitu: Ijab Qabul Obyek Jual beli
- d. Menurut Madzhab Hanabilah merumuskan tiga kategori syarat jual beli, yaitu: Aqid, Sighat, dan Obyek Jual Beli.

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam transaksi jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli

Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS an-Nisaa'/4:5 yaitu :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan terjemah*, h. 61.

b. Syarat uang dan barang yang dijual

- 1) Keadaan barang suci atau dapat disucikan.
- 2) Barang yang dijual memiliki manfaat.
- 3) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
- 4) Barang yang dijual dapat diserahkan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
- 5) Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

c. Ijab Kabul

Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kabul harus sesuai dengan ijab
  - 2) Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya.
  - 3) Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya
-



menemukan uang”. Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Dari aspek obyeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu: *Bai' al-Muqayyadah* yaitu jual beli barang dengan barang yang biasa disebut jual beli barter. *Bai' al-Muthlaq* yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan harga secara mutlak *Bai' al-Sharf* Yaitu menjualbelikan alat pembayaran dengan yang lainnya. *Bai' al-Salam* Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tanggungan) Hal ini ditunjukkan dengan adanya jual beli di dunia maya, contoh jual beli lewat internet, online dan lain-lain. Jual beli barang najis seperti anjing, babi, dan sebagainya. Dalam Islam segala sesuatunya telah diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Begitu juga dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dan dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh.<sup>36</sup> Adapun macam-macam jual beli dalam Islam yaitu:

##### a) Pengertian *Istishna*

Berasal dari kata *عند* (shana'a) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta' menjadi *عندت* (istashna'a) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. *Istishna'* atau pemesanan secara bahasa artinya: meminta di buatkan. Menurut terminologi ilmu fiqh artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang

---

<sup>36</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (cet. Ke-1 Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2015), H, 174.

berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat di buatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

Contohnya: seseorang pergi ke salah satu tukang, misalnya tukang kayu, tukang besi atau tukang jahit. Syarat sahnya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari si tukang. Kalau berasal dari pihak pemesan atau pihak lain, tidak disebut pemesanan, tetapi menyewa tukang.<sup>37</sup>

#### b) Pengertian *Salam*

Salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bay' al-ma'dum*). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istisna', yaitu :

Cara pembayaran dalam salam harus di lakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istisna' dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa di angsur atau bisa di kemudian hari. salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan istisna' menjadi.<sup>38</sup> pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamar, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis,

<sup>37</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016). h. 93

<sup>38</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016).h. 97

yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.<sup>39</sup> Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama islam karena merugikan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Memperjual belikan barang-barang yang haram
- b. Jual beli barang untuk mengacaukan pasar
- c. Jual beli barang curian
- d. Jual beli dengan syarat tertentu
- e. Jual beli yang mengandung unsur tipuan
- f. Jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam

Ada juga larangan yang berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal di atas seperti adanya penyulitan dan sikap merugikan, seperti orang yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, menjual senjata saat terjadinya konflik sesama muslim, monopoli dan sejenisnya. Juga larangan karena adanya pelanggaran syariat seperti berjualan pada saat dikumandangkan adzan shalat Jum'at.

#### 1. Jual Beli yang diharamkan

- a. Menjual tanggungan dengan tanggungan

Telah diriwayatkan larangan menjual tanggungan dengan tanggungan sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi dari Ibnu 'Umar Ra. Yaitu menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan juga. Misalnya,

---

<sup>39</sup>Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 141.

menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Ini adalah bentuk riba yang paling jelas dan paling jelek sekali.

b. Jual beli disertai syarat

Jual beli disertai syarat tidak diijinkan dalam hukum Islam. Malikiyah menganggap syarat ini sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli seperti agar pembeli tidak menjualnya kembali atau menggunakannya. Hambaliyah memahami syarat sebagai yang bertentangan dengan akad, seperti adanya bentuk usaha lain, seperti jual beli lain atau peminjaman, dan persyaratan yang membuat jual beli menjadi bergantung, seperti "Saya jual ini kepadamu, kalau si Fulan ridha." Sedangkan Hanafiyah memahaminya sebagai syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut tapi bermanfaat bagi salah satu pihak.

c. Dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli tidak dibolehkan melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya sebagai berikut:

- 1) Jual beli dengan dua harga, harga kontan dan harga kredit yang lebih mahal.  
Mayoritas ulama sepakat memperbolehkannya dengan ketentuan, sebelum berpisah, pembeli telah menetapkan pilihannya apakah kontan atau kredit.
- 2) Jual beli 'Inah, yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu si penjual membelinya kembali dengan pembayaran kontan yang lebih murah.

3) Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang atau menawarkan barang yang masih ditawarkan orang lain. Mayoritas ulama fiqh mengharamkan jual beli ini. Hal ini didasarkan pada larangan dalam hadits shahih Bukhari dan Muslim, "Janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan dalam transaksi orang lain.

4) Menjual anjing. Dalam hadits Ibnu Mas'ud, Rasulullah telah melarang mengambil untung dari menjual anjing, melacur dan menjadi dukun (HR. Bukhari).

## 2. Jual Beli yang Diperdebatkan

- a. Jual beli 'Inah yaitu jual beli manipulatif agar pinjaman uang dibayar dengan lebih banyak (riba).
- b. Jual beli Wafaf yakni jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual mengembalikan uang bayaran dan si pembeli mengembalikan barang.
- c. Jual beli dengan uang muka. Yaitu dengan membayarkan sejumlah uang muka (*urbun*) kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan ke dalam harganya.
- d. Jual beli Istijrarm yaitu mengambil kebutuhan dari penjual secara bertahap, selang beberapa waktu kemudian membayarnya. Mayoritas ulama "membolehkannya, bahkan bisa jadi lebih menyenangkan bagi pembeli dari pada jual beli dengan tawar menawar.

### 5. *Etika Jual Beli*

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar tiga istilah yang sangat populer sekali yaitu, moral, etika dan akhlak.<sup>40</sup> Memang erat hubungan ketiganya sangat akrab kedengaran ditelinga kita sehingga tidak terpikirkan apakah kata-kata ini memiliki makna yang sama atau sebaliknya. Kalau kita cermati, tampaknya dari dari berbagai literatur yang mengkaji tentang moral memberikan terminologi yang secara substansial mengandung makna yang sama, yaitu norma kebaikan yang di hadapkan pada norma keburukan.

Kata akhlak yang sudah jadi bahasa Indonesia ini diartikan sebagai ilmu yang menentukan batas baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Sebagai contoh apabila dalam suatu pertemuan kita melihat seseorang yang berangkulan pada saat berjumpa orang lain, perilaku ini merupakan symbol bahwa kedua orang tersebut sangat akrab, saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya. Tetapi dibalik perilaku lahir yang tampak baik itu, sebenarnya hati qalbu mereka berdua belum tentu tulus, dengki, jahat, dan sebagainya, maka orang yang mempunyai perilaku hati yang demikian dapat dikatakan belum berakhlak, inilah kelebihan ajaran akhlak dalam islam.<sup>41</sup>

Dalam islam seorang pelaku bisnis atau pedagang tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga suatu berkah dan rezeki yang diridhai Allah. Keuntungan yang kita harus dapatkan bukan hanya dari segi materil melainkan juga inmateril.

---

<sup>40</sup>Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 6.

<sup>41</sup>Hamzah Ya'kub, *Etika Islam* ( Bandung: CV Diponegoro, 1991), h. 16.

Keuntungan materil bisa saja kita dapatkan dalam membuat usaha, namun belum tentu dengan keuntungan inmateril atau dalam segi agama dan kepuasan batin. Selain itu islam juga mengatur urusan jual beli manusia dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam yang sudah ditetapkan.

Seperti misalnya dalam urusan transaksi Ekonomi dalam Islam, Tujuan Ekonomi Islam, bagaimana Ekonomi Dalam Islam, serta Hukum Ekonomi Syariah Menurut Islam, dan Macam-macam Riba. Islam sudah mengatur bagaimana cara beretika dalam jual beli dalam Qur'an dan Sunna Rasulullah, karena pasti ada Hikmah Jual Beli yang sudah Rasul ajarkan pada umatnya. Ada pun etika yang harus di taati dalam jual beli dalam islam sebagai berikut.

#### 1. Jujur / Terbuka / Transparan.

Dalam sebuah bisnis islam customer adalah raja, dan sebagaimana mestinya seorang raja harus diperlakukan secara khusus. Hal ini menyangkut bagaimana pelayanan kita kepada mereka, para customer akan merasa lebih nyaman jika kita dapat memberikan *service* yang memuaskan. Bahkan terkadang mereka tidak akan memperdulikan perbedaan harga melainkan *service* yang kita berikan. Dalam sebuah perdagangan, kejujuran adalah hal yang sangat penting.

Kejujuran harus menjadi sebuah prinsip dagang bagi seorang pengusaha muslim. Namun seorang pedagang atau pengusaha biasanya merasa kesulitan dalam melakukan hal ini. Jadilah pengusaha yang menjaga kejujuran pada setiap customer, ikutilah cara berdagang yang telah dicontohkan oleh Rasul kita. Menjadi seorang pedagang yang seperti Rasulullah contoh kan bukanlah hal yang mudah, terutama di

zaman yang penuh dengan fitnah ini. Segala macam cara menjadi halal digunakan semata-mata hanya demi keuntungan satu pihak. Jangankan seorang pedagang, pejabat pun sanggup untuk melakukan penghianatan korupsi demi menuruti nafsu duniawi.

Islam mengajarkan kepada kita ilmu berdagang yang baik, etika atau adab berdagang yang benar. Seharusnya kita sebagai orang islam menjunjung tinggi bagaimana etika yang di ajarkan islam dalam urusan jual beli atau berdagang. Jujur memang hal yang terlihat sepele dan gampang untuk dilakukan, tapi jangan salah justru iman seseorang akan di ujia melalui kejujurannya saat berdagang. Contohlah apa yang Rasulullah lakukan ketika beredagang, beliau selalu mengutamakan kejujuran. Seperti misalnya ketika beliau memberikan penjelasan tentang kualitas atau spesifikasi suatu barang, menghitung timbangan dan lain sebagainya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS Asy-Syu'araa/26:181, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
  
 أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ  
 ALAUDDIN  
 MAKASSAR

Terjemahnya:

”Sempurnakanlah takaran jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi”.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemah*, h. 299.



## 2. Menjual Barang yang Halal.

Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam perdagangan. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Qur'an. Oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan perdagangan kita wajib mengetahui asal muasal dari apa yang kita perjual belikan. Selain itu sebagai kehalalan hasil yang kita dapatkan juga harus terhindar dari Macam-Macam Riba. Oleh sebab itu kita harus tahu apa Pengertian Riba dalam islam dan apa saja Bahaya Riba bagi pelakunya. Hal ini sudah ditetapkan sejak Rasulullah menerima wahyu surah Al-Baqarah/2:275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>43</sup>

### 3. Menjual Barang Dengan Kualitas Yang Baik

Sebagai seorang pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik ataukah kurang layak untuk kita jual kepada customers. Kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada customers.

Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam perdagangan. Karena jika kita tidak jujur dengan kualitas barang yang kita jual, maka hal ini akan berdampak negative bagi diri kita sendiri sebagai pedagang. Seperti misalnya barang yang kita jual memiliki kualitas yang rendah, namun kita katakan pada customers jika barang tersebut memiliki barang yang luar biasa. Ketika customer mau membeli dagangan tersebut karena jaminan yang kita berikan, otomatis ketika si customer menggunakan barang tersebut merasa rugi dan kecewa dengan kita sebagai pedagang. Hal ini dapat di katakan cacat etis atau cacat moral karena apa yang sudah pedagang katakan tidak sesuai dengan kualitas barang yang ia jual.

---

<sup>43</sup>Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemah*, h. 36.

#### 4. Tidak Menyembunyikan Cacat Pada Barang

Sebagai seorang pedagang sudah seharusnya kita menerangkan tentang bagaimana kualitas suatu barang. Tapi tidak hanya itu karena jika barang yang kita jual memiliki cacat, maka tugas kita sebagai penjual harus mampu memberi tahu pada customer tentang cacat barang tersebut.

Ibnu Majah menuturkan Watsilah bin Al-Asqa ra, dia mengatakan ‘Aku pernah mendengar Nabi saw berkata, “Barang siapa yang menjual suatu barang yang mempunyai cacat yang tidak diterangkannya, niscaya dirinya berada dalam murka Allah dan para malaikat pun mengutuknya.”’

#### 5. Tidak Memberikan Janji Atau Sumpah Palsu

Jika kita pergi kesuatu pasar atau katakanlah kaki lima. Sering kali kita mendengarkan seorang pedagang mengucapkan janji atau sumpah tentang kualitas barang yang ia jual. Seperti misalnya “barang dijamin tidak mudah rusak” atau “sumpah paling murah neng”, kata-kata yang seperti itu termasuk dalam janji atau sumpah yang akan menjadi tanggung jawab kita bahkan hingga di akhirat kelak.<sup>44</sup>

### **B. Plat Nomor Kendaraan Bermotor**

#### **1) Pengertian Plat Nomor**

Plat nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotorbermotor. Plat nomor juga disebut plat registrasi kendaraan, atau di Amerika Serikat dikenal sebagai plat izin (*license plate*). Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik

---

<sup>44</sup>Tsabita zacky, 7 *Etika Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/etika-jual-beli-dalam-ekonomi-islam>, (28 september 2017)..

yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Biasanya plat nomor jumlahnya sepasang, untuk dipasang di depan dan belakang kendaraan. Namun ada yurisdiksi tertentu atau jenis kendaraan tertentu yang hanya membutuhkan satu plat nomor, biasanya untuk dipasang dibagian belakang.

Plat nomor memiliki nomor seri yakni susunan huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan. Nomor ini di Indonesia disebut nomor polisi dan biasa dipadukan dengan informasi lain mengenai kendaraan bersangkutan, seperti warna, merk, model, tahun pembuatan, nomor identifikasi kendaraan atau VIN dan tentu saja nama dan alamat pemiliknya. Semua data ini juga tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STNK yang merupakan surat bukti bahwa nomor polisi itu memang ditetapkan bagi kendaraan tersebut.

Plat nomor digunakan sebagai identifikasi kendaraan oleh banyak lembaga, seperti kepolisian, perusahaan asuransi mobil, bengkel, tempat parkir dan juga armada kendaraan bermotor. Di beberapa wilayah yurisdiksi, plat nomor juga dipakai sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut sudah memiliki 'izin' untuk beroperasi di jalan raya umum, atau juga sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun di beberapa negara, seperti Inggris misalnya, mobil selalu menggunakan plat nomor yang sama sejak saat pertama dijual hingga akhir masa operasinya, dengan pertimbangan semua informasi yang ada di plat nomor dan kendaraan bersangkutan juga tidak pernah berubah.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki peraturan tertentu mengenai plat motor. Sehingga plat nomor perlu diganti secara berkala yakni

saat habis masa berlakunya atau karena dijual atau berpindah tangan. Ini yang dikenal dengan kebijakan *"plate-to-owner"* atau plat nomor yang terkait dengan kepemilikan. Artinya, ketika mobil dijual, penjual harus melepas plat nomornya sementara pembeli harus meminta plat nomor baru dari pihak berwenang sesuai wilayah tempat tinggalnya dan mendaftarkan kembali atas namanya (balik nama). Bila orang yang menjual mobil tersebut membeli mobil baru, ia dapat meminta agar plat nomornya yang lama dipasang di mobilnya yang baru. Bila tidak, ia harus mengembalikan plat nomor ke pihak berwenang, menghancurkannya, atau menyimpannya sebagai barang kenangan.<sup>45</sup>

Di banyak negara, plat nomor dikeluarkan oleh Badan Pemerintahan Nasional, kecuali di Kanada, Mexico, Australia, Jerman, Pakistan dan Amerika Serikat, karena plat nomor diterbitkan oleh lembaga pemerintah provinsi, wilayah atau negara bagian.<sup>46</sup>

## 2) Macam-macam Plat Nomor

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
- b. Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.

<sup>45</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* , h. 99.

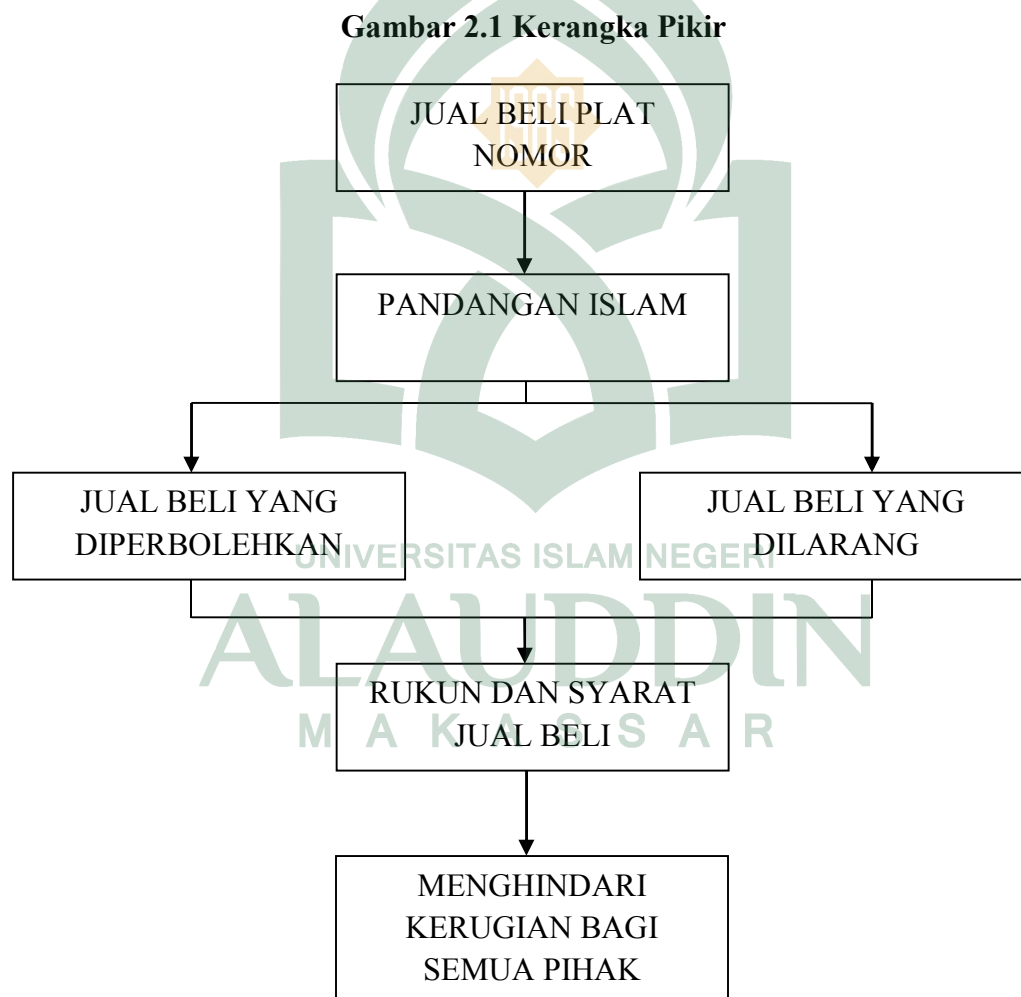
<sup>46</sup>Wikipedia, *Plat Nomor*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Plat\\_nomor](https://id.wikipedia.org/wiki/Plat_nomor), ( 28 september 2017).

<sup>47</sup>Wikipedia, *Plat Nomor*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Plat\\_nomor](https://id.wikipedia.org/wiki/Plat_nomor), (17 November 2017).

- c. Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- d. Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih/merah dengan tulisan berwarna hitam.
- e. Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
- f. Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam.
- g. Kendaraan tidak bermotor di Surabaya: warna dasar biru dengan tulisan putih.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dikembangkan dari pandangan ekonomi Islam tentang jual beli plat nomor kendaraan bermotor sehingga akan mampu menghasilkan suatu sistem jual beli plat nomor di kota Makassar yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun gambaran kerangka pikir yang menjadi arah penelitian penulis digambarkan sebagai berikut :



### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan obyek penelitian (penjual plat nomor kendaraan di pinggir jalan), untuk memperoleh data-data yang berkaitan sistem jual beli plat nomor kendaraan.<sup>46</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis, yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas atas keadaan dan fenomena yang terjadi. Penelitian ini adalah studi yang meneliti kualitas hubungan, aktivitas, situasi atau berbagai material.

##### ***B. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Pelaksanaan penelitian ini bertempat di kota Makassar, Sulawesi Selatan 92311, Indonesia pada tahun 2017. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena di kota Makassar jual beli plat nomor marak dilakukan dengan bebas tanpa adanya larangan atau peraturan yang ditegaskan oleh pemerintah. Padahal seperti yang diketahui bahwa kantor samsat telah menyediakan plat nomor asli yang sesuai ketentuan dengan syarat setiap pemilik kendaraan wajib melakukan pembayaran pajak.

---

<sup>46</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 68.



### **C. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan objek kajian dalam penelitian ini, maka dapat dikategorikan bahwa peneliti menggunakan pendekatan penelitian Normatif dan Sosiologi. Peneliti melakukan pendekatan normative karena berupa teks-teks Al-Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologi karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan lapangan, maka dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui pengkajian terhadap literature-literature pustaka yang koheren dengan objek yang dimaksud. Yakni mengkaji kitab-kitab atau buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan. Serta melalui survei lapangan berupa wawancara. Adapun Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>47</sup>

Dalam penelitian, peneliti dalam mendapatkan data bisa bersumber dari data primer dan data sekunder :

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

---

<sup>47</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1993), h. 107.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>48</sup>

Data adalah hasil peneliti baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat di peroleh.<sup>49</sup>

### ***E. Metode Pengumpulan Data***

Pengumpulan data adalah “prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”.<sup>50</sup> Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti.

Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dalam skripsi ini dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8), h. 137.

<sup>49</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Edisi Revisi V, Jakarta: RinekaCipta, 2002), h. 107.

<sup>50</sup>Moh. Natsir, *Metode Penelitian* . (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 174.

## 1. Observasi

“Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kenyataan yang diselidiki”.<sup>51</sup> Di dalam pengertian psikologis, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan itu merupakan pengamatan langsung.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatapan muka antara siwawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Sehingga mendapatkan data yang diperlukan.<sup>53</sup> Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

---

<sup>51</sup>SutrisnoHadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 2003), h. 21.

<sup>52</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya*, h.111.

<sup>53</sup>Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Peneltian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 57.

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku.<sup>54</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang ditulis.<sup>55</sup> Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku majalah, dokumen, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.

### ***F. Instrumen Penelitian***

Instrument penelitian merupakan suatu unsur yang amat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrument penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri. Sehingga nantinya dalam merangkum permasalahan. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

#### 1. Pedoman wawancara mendalam

---

<sup>54</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: BumiAksara, 2003), h. 117.

<sup>55</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2000), h.178

2. Kamera
3. Handphone yang berfungsi sebagai alat perekam

#### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

##### **1. Pengolahan Data**

Penelitian ini merupakan “penelitian kualitatif” maka pengolahan data yang akan dilakukan oleh penelitian adalah sebagai berikut”.<sup>56</sup>

##### **a. Reduksi Data**

Peneliti akan mengarahkan dan menggolongkan bagian-bagian yang berhubungan dengan penelitian.

##### **b. Penyajian Data**

Penyusunan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bisa diambil sebagai hasil akhir penelitian.

##### **c. Penarikan Kesimpulan**

Penelitian akan menarik kesimpulan yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian untuk bisa disajikan kedalam hasil akhir penelitian.

---

<sup>56</sup>Miles Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Cet, I; Jakarta UI Press, 1992), h. 17.

## 2. Analisis Data

Peneliti dalam menganalisa data dikemudian hari akan menggunakan teknik analisis deskriptif yang mana peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Penjabaran hasil penelitian akan menggunakan penggambaran dan menggunakan bahasa baku dan universal dan menghindari terlalu banyak bahasa-bahasa yang dapat membawa hasil analisis deskriptif nanti pada ketidak pahaman pembaca dalam melihat hasil analisis data.<sup>57</sup>

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Proses analisis data deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap data riil yang diperoleh dari lapangan dan belum diolah, yaitu dengan membuat batasan data yang diolah (berdasarkan data yang diperoleh) dan menyajikan pada Bab III, kemudian disimpulkan berdasarkan data-data yang diperoleh dan telah diolah dan analisis terhadap data-data pada Bab III, yaitu diawali dengan membuat kategori-kategori yang berkaitan dengan permasalahan.

---

<sup>57</sup>Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 192.

### ***H. Pengujian Keabsahan Data***

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif maka harus didukung dengan data yang tepat pula. Derajat kepercayaan menggambarkan kesesuaian konsep penelitian. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memperoleh kepercayaan antara lain :

1. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan.
2. Mengadakan keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan.
3. Melakukan triangulasi data yaitu mengecek kebenaran data dengan cara membanding data dengan sumber lain.

Data yang diperoleh dari informasi perlu diteliti kebenarannya dengan cara melakukan perbandingan data yang diperoleh dari informasi yang lain. Keabsahan data dalam penelitian ini di periksa dengan teknik triangulasi, yaitu teknik penilaian keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data-data tersebut.<sup>58</sup>

Adapun teknik triangulasi yang sering digunakan adalah teknik triangulasi sumber data triangulasi teori, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti. Berdasarkan teknik-teknik triangulasi di atas maka untuk menguji keabsahan data

---

<sup>58</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2002), h. 178.

dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data yaitu data akan diperoleh dari para penjual plat nomor kendaraan di Kota Makassar.





## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum objek penelitian***

##### **1. Kondisi Geografis**

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km<sup>2</sup> menjadi 175,77 km<sup>2</sup> dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung

Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

## **2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- d. Sebelah Barat : Selat Makassar

Utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau *sangkarang*, atau disebut juga pulau-pulau *pabbiring*, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (*gusung*) dan Pulau Kayangan (terdekat).

### 3. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat  $119^{\circ} 18' 30,18''$  sampai dengan  $119^{\circ} 32' 31,03''$  BT dan  $5^{\circ} 00' 30,18''$  sampai dengan  $5^{\circ} 14' 6,49''$  LS. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut ini deskripsi wilayah tiap kecamatan yaitu :

#### 1. Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya  $48,22 \text{ km}^2$  atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Topografi wilayah kecamatan ini mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-19 m di atas permukaan laut. Potensi sumberdaya alam yang ada di kecamatan ini antara lain di sektor pertanian dan perikanan.

Berdasarkan data BPS (2013), di subsektor pertanian, luas lahan peruntukannya sebagai lahan sawah yakni 657 ha dan lahan tegalan 284 ha. Subsektor perikanan darat, luas lahan peruntukan sebagai tambak 479 ha dengan produksi 149,80 ton. Secara umum, Pantai Kecamatan Biringkanaya sebagian besar merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Hanya sebagian kecil pantai ini tergolong cadas. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, namun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi dari Sungai Mandai. Di samping itu juga tampak adanya gejala abrasi sepanjang sekitar 30 m di perkampungan nelayan Kelurahan Untia.

## 2. Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas kedua sesudah Kecamatan Biringkanaya, dengan luas 31,84 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk 89.143 jiwa. Topografi wilayah kecamatan dimulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkantoran, pertokoan hingga gedung pendidikan. Salah satunya adalah Universitas sebagai universitas terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai memiliki tambak.

Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan tambak juga ditemukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi

mangrove serta merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula pantai cadas di sebelah selatan Lantebung (Kelurahan ParangLoe).

Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun juga tampak adanya gejala abrasi dalam skala kecil sepanjang sekitar 20 meter di Lantebung (Kelurahan Bira). Potensi sumberdaya alam yang masih dapat ditemukan di kecamatan ini adalah tambak. Secara keseluruhan luas lahan tambak di Kecamatan Tamalanrea yaitu 588 ha, dengan produksi perikanan darat (tambak) yaitu 190,10 ton.

### 3. Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Luas wilayah sebesar 24,14 km<sup>2</sup> atau sekitar 13,73% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan kepadatan penduduk 4.101 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 2-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas dibandingkan kecamatan lain yakni 827 ha dan 411 ha dengan potensi produksi 4774,90 ton dan 1360,84 ton. Di sektor perikanan darat memiliki potensi yang kecil. Tahun 2008 produksinya hanya sekitar 59,10 ton atau senilai 1.156.200 rupiah.

Meskipun di sub sektor perikanan kecil, namun di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan kecil dalam jumlah yang sangat besar. Untuk populasi ternak besar (sapi dan kerbau) 1352 ekor sedangkan untuk populasi ternak kecil (kambing) 1.016 ekor.

#### 4. Kecamatan Tamalate

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 10 kelurahan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 152.197 jiwa atau 12,14% dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Makassar. Luas wilayah kecamatan ini 20,21 km<sup>2</sup> sehingga kepadatan penduduk berkisar 7.531 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi ketinggian 1-6 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Persentase penggunaan lahan pertanian terhadap luas wilayah kecamatan terdiri atas 27,07% lahan sawah dan 5,70% tegalan/kebun dengan produksi padi sebesar 3936,32 ton dan tegalan/kebun sebesar 83,85 ton. Di sektor pertambangan, bahan galian C terutama pasir, batu dan sirtu terdapat di Kelurahan Mallengkeri. Kecamatan Tamalate mempunyai pantai terpanjang diantara kecamatan-kecamatan yang mempunyai pantai di Kota Makassar, yaitu sepanjang sekitar 10 km (panjang pantai Kota Makassar sekitar 35 km). Dengan panjang pantai 31,25% dari panjang pantai Kota Makassar, mampu menyumbangkan 2.696 ton di sektor perikanan laut dan armada kapal tangkap berjumlah 248 buah. Pada umumnya pantai di kecamatan ini bertipe pantai berpasir dengan lebar pantai sekitar 10-30 meter serta kelandaiannya 3%. Secara umum pantai ini dapat dikatakan relatif stabil sekalipun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi pasir halus dari Sungai Jeneberang maupun dari arah selatan. Dengan kondisi pantai tersebut, maka sebagian besar pantai ini digunakan sebagai areal pariwisata pantai.

#### 5. Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Panakukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, dengan kepadatan penduduk 7.891 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman. Saat ini kondisi jalan utama di Kecamatan Panakkukang telah mengalami pelebaran jalan pada bahu jalan selebar 15-22 meter.

#### 6. Kecamatan Rappocini

Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km<sup>2</sup> atau sekitar 5,25% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman. Persentase penggunaan lahan sebagai kawasan pemukiman sangat besar hampir 65% sedangkan penggunaan lahan di sektor pertanian sebagai lahan sawah hanya seluas 20 ha (17 ha luas lahan panen).

#### 7. Kecamatan Ujung Tanah

Kecamatan Ujung Tanah merupakan kecamatan yang memiliki 5 pulau dengan potensi perikanan laut yang sangat besar yakni 6.709 ton. Luas wilayahnya 5,94 km<sup>2</sup> atau 3,38% dari luas keseluruhan Kota Makassar, dengan jumlah penduduk

48.382 jiwa serta kepadatan penduduk 8.145 jiwa/km<sup>2</sup>. Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini terdiri atas dua kelompok, yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat nelayan termasuk masyarakat yang mendiami pulau-pulau di kecamatan ini. Selain potensi perikanan yang sangat besar, potensi pariwisata bawah air menjadi andalan di Kecamatan Ujung Tanah dengan 5 pulau yang menyajikan keindahan bawah laut yang kaya akan keragaman hayatinya sebagai suatu poin menarik bagi para wisatawan. Di sisi lain guna menjaga kestabilan pantai di Kecamatan Ujung Tanah, sebagian besar sudah mengalami pengerasan dengan tembok yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Hal ini mengingat pantai tersebut mempunyai nilai penting karena perairan pantainya dimanfaatkan untuk pangkalan pendaratan ikan (TPI Paotere), pelabuhan dan *docking* kapal TNI AL, Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari. Kecamatan ini berada pada wilayah pesisir bagian utara Kota Makassar.

#### 8. Kecamatan Tallo

Berdasarkan data BPS (2013), Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak (15 kelurahan), dengan luas wilayahnya 5,83 km<sup>2</sup> atau 3,32% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi 1- 3 m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan yang dimiliki terdiri dari sektor pertanian yakni hanya 25 ha (lahan sawah dan tegalan/kebun) dan sektor perikanan darat (tambak) 293 ha. Total produksi pertanian tahun 2008 sebesar 49,15 ton sedangkan di subsektor perikanan 2.585,90 ton. Potensi bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan Sungai



Tallo ke pemukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrove-nya sangat minim serta merupakan pantai yang landai. Pada bagian barat pantai kecamatan ini sudah ada kegiatan reklamasi pantai sekitar sepanjang 200 m sebagai lahan kegiatan industri pengolahan kayu. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling barat Kelurahan Tallo.

#### 9. Kecamatan Mamajang

Luas wilayah Kecamatan Mamajang adalah 2,25 km<sup>2</sup> atau 1,28% luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan kepadatan penduduk 26.842 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayah yang merupakan dataran rendah dengan elevasi 1–5 m di atas permukaan laut yang memungkinkan pengembangan lahan kecamatan sebagai kawasan pemukiman. Kecamatan Mamajang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju infiltrasi tinggi sehingga potensi ancaman banjir sangat kecil.

#### 10. Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang dijadikan sebagai tempat area publik karena adanya Pantai Losari yang menjadi ikon Kota Makassar. Luas wilayahnya 2,63 km<sup>2</sup> atau 1,50% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Kecamatan Ujung Pandang memiliki jumlah penduduk terendah yakni 28.637 jiwa (2,28%) dengan kepadatan penduduk berkisar 10.889 jiwa/km<sup>2</sup>. Ancaman terhadap bahaya abrasi sangatlah besar sehingga diperlukan bangunan pemecah ombak di depan pantai. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Ujung Pandang umumnya juga sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, khususnya pada Daerah Rekreasi Pantai Losari dan sekitarnya. Hanya sebagian lokasi di sebelah utara pantai kecamatan ini merupakan kompleks perhotelan (Pantai Gerbang Makassar Hotel dan Makassar Golden Hotel) serta dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa ke Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan dan pulau-pulau lainnya di wilayah Kota Makassar. Selain itu, Kecamatan Ujung Pandang juga berpotensi terhadap pencemaran air laut dan air tanah karena penggunaan lahan yang lebih diarahkan pada pembangunan hotel. Selain itu juga restoran merupakan usaha paling besar memberikan kontribusi terhadap pencemaran air di kecamatan ini.

#### 11. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 32.900 jiwa/km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 82.907 jiwa dengan luas wilayah 2,52 km<sup>2</sup> atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah Kota Makassar. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman,

pertokoan dan perkantoran. Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan (tambak).

## 12. Kecamatan Bontoala

Luas wilayah Kecamatan Bontoala adalah 2,10 km<sup>2</sup> atau 1,19% dari keseluruhan luas Kota Makassar yang terdiri atas 12 kelurahan. Kecamatan Bontoala termasuk dalam kategori kecamatan terpadat (urutan ke-3) yakni 29.433 jiwa/km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 61.809 jiwa. Topografi di kecamatan ini dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut, sebagian daerah di kecamatan ini berpotensi banjir utamanya daerah yang dialiri anak Sungai Tallo. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diperuntukkan sebagai pemukiman, sehingga kecamatan ini tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan.

## 13. Kecamatan Wajo

Salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum dan Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km atau 1,13% dari luas keseluruhan wilayah Kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo 35.011 jiwa dengan kepadatan 17.593 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara topografi, kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi terjadi abrasi. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Wajo umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang sebagai pelindung pantai.

#### 14. Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 1,82km<sup>2</sup>, dengan tingkat kepadatan sebesar 30.009 jiwa/km<sup>2</sup>. Potensi sumber daya alam di Kecamatan ini yaitu subsektor perikanan laut. Kecamatan mampu menghasilkan 1.227 ton hasil laut atau 3.767.509 rupiah. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini berupa abrasi pantai. Oleh karena itu pantai di Kecamatan Mariso pada umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, karena sebagian besar pantai di kecamatan ini merupakan daerah pangkalan pendaratan ikan (TPI Rajawali) dan permukiman pantai.

#### 4. Pertumbuhan Kendaraan dan Jaringan Jalan

Pertumbuhan Kendaraan dan Jaringan Jalan Makassar saat ini mengalami problematika transportasi seperti umumnya kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan selalu terjadi pada setiap jam sibuk, volume kendaraan bermotor terus meningkat tanpa terkendali. Sementara banyak jalan raya telah mencapai tingkat jenuh yang tinggi di mana jumlah kendaraan yang melalui jalan tersebut nyaris melebihi kapasitasnya yang dilihat dari rasio volume kendaraan per kapasitas jalan ( $V/C$ ) yang rata-rata melebihi nilai 0.5 pada beberapa ruas jalan yang berarti volume kendaraan telah melebihi 50% dari kapasitas jalan sehingga berpotensi terjadinya perlambatan kecepatan hingga kemacetan akibat tingkat kejenuhan yang semakin bertambah

karena pertumbuhan volume kendaraan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terjadinya kemacetan juga tak lepas dari pertumbuhan kendaraan yang tak terkendali terutama untuk jenis kendaraan sepeda motor yang meningkat hingga 15% per tahun. Kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang tidak mendukung bertumbuhnya modal transportasi massal yang mempunyai kapasitas angkut yang besar semakin menambah jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi sehingga rawan menimbulkan kemacetan. Berdasarkan data kendaraan bermotor yang telah diregistrasi di Kantor Samsat Makassar, pada akhir Agustus tahun 2017 untuk jenis kendaraan mobil penumpang (206.435 unit), bus (17.264 unit), mobil barang (72.239 unit) dan kendaraan khusus (403 unit), sementara jumlah sepeda motor mencapai 1.128.809 unit.

## ***B. Jual Beli Plat Nomor Kendaraan di Kota Makassar***

### **1. Penjual Plat Nomor Kendaraan**

Salah satu bagian unik dari sebuah kendaraan bermotor adalah plat nomor polisi kendaraan tersebut yang secara formal disebut Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), plat nomor polisi merupakan identitas utama dari sebuah kendaraan bermotor yang laik jalan/beroperasi di jalan raya, sehingga plat nomor polisi umumnya diletakkan pada posisi yang mudah dilihat. Mengenai pelat nomor kendaraan pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, demikian yang disebut oleh Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor

wajib menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan.

Kehadiran jasa pembuatan plat nomor tidak terlepas dari semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Makassar. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor menjadikan plat nomor kendaraan sebagai peluang usaha tersendiri. Pertumbuhan atau perubahan kehidupan masyarakat sekitar seringkali memunculkan peluang yang menjajikan kepada yang dapat menangkap peluang (*oppurtunity*) tersebut.<sup>57</sup>

Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Lulu sebagai penjual plat nomor kendaraan bahwa:

“Alasan saya membuka usaha penjualan plat nomor untuk mendapatkan keuntungan pastinya dan untuk membantu orang yang mau membuat plat nomor dengan cepat tanpa harus ke samsat”.<sup>58</sup>

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ilyas dan Aco bahwa:

“Kami menjual untuk dapat keuntungan, karena kami melihat ada banyak peluang dibisnis ini. Kebanyakan masyarakat lebih memilih membuat plat nomor di tempat Kami dibandingkan langsung ke samsat yang harus antri dulu”.<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku penjualan plat nomor kendaraan, merasa memiliki peluang dan keuntungan dalam usaha tersebut. Setiap pemilik kendaraan bermotor seperti motor dan mobil, dapat dijadikan sebagai target pasar usaha. Para pemilik kendaraan biasanya membuat plat nomor

---

<sup>57</sup>Siswanto, Fritz Kleinsteuber, Strategi Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Damar Media Pustaka, 2002), h. 8.

<sup>58</sup>Lulu (35 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018.

<sup>59</sup>Ilyas (32 Tahun) dan Aco (24 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018.

kendaraan jika plat aslinya hilang, namun ada juga sebagian konsumen yang sengaja membuat plat nomor kendaraannya untuk variasi agar plat nomor sesuai dengan yang diinginkan. Adanya penjualan plat nomor kendaraan tersebut, dianggap mempermudah konsumen untuk mendapatkan plat nomor kendaraan tanpa perlu ke samsat terlebih dahulu.

Kurang tegasnya penegak hukum menyebabkan masyarakat enggan dengan hukum, sehingga menimbulkan sikap yang apatis terhadap pelanggaran lalu lintas termasuk tentang pembuat plat nomor modifikasi. Pemerintah memang belum menetapkan adanya pasal atau undang-undang yang mengatur langsung tentang pembuat plat nomor modifikasi, tetapi hanya memberikan sosialisasi atau penyampaian. Pasal 280 tentang TNKB menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>60</sup>

Kesengajaan untuk melanggar peraturan berlalu lintas disebabkan karena Pasal 280 UULLAJ mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- a. Penindakan aparat penegak hukum hanya memberikan teguran kepada pelanggar, sehingga pelanggar mengabaikan Undang - undang tersebut Khususnya Pasal 280 UULLAJ.
- b. Pemberian surat tilang kepada pelanggar, tidak langsung diproses disebabkan karena aparat penegak hukum hanya memberikan kebijaksanaan di jalan.

Pelaksanaan akad dalam transaksi jual beli plat nomor kendaraan di Makassar dilakukan setelah pengerjaan plat nomor tersebut selesai sesuai dengan pesanan pembeli. Pihak yang melakukan akad disini adalah penjual, yakni seseorang yang berjasa membuat plat nomor (tukang plat nomor), sedangkan pemesan pembuatan plat nomor tersebut bertindak sebagai pembeli. Para pihak tersebut melaksanakan di tempat atau kios pembuatan plat nomor. Barang tersebut dapat diserahkan penjual kepada pembelinya, obyek jual beli plat nomor di Makassar dapat dinegosiasikan atau dapat dilakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Ilyas sebagai penjual plat nomor kendaraan bahwa:

“Soal harga, wajar kalau terjadi tawar-menawar namanya juga jualan. Tapi saya juga punya ketentuan, biasanya harga disesuaikan dengan tingkat kesulitan, bahan serta jenis kendaraan. Untuk motor biasanya minimal saya jual 25.000, sedangkan untuk mobil 250.000.”<sup>61</sup>

Bapak Lulu juga mengungkapkan bahwa:

“Pembayaran biasanya dilakukan setelah pesanan jadi. Disitu pembeli membayar pesanan yang saya buat. Kalau ijab qabulnya, paling bilang ucapan terimakasih, terus saya jawab sama-sama”.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Ilyas (32 Tahun) dan selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018

<sup>62</sup>Lulu (35 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018.



Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli diperbolehkan untuk menawar harga yang diajukan oleh penjual. Proses akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli plat nomor dilakukan pada saat penarikan plat nomor yang sudah jadi dari penjual. Pembeli memberikan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati untuk sebuah plat nomor yang dia pesan.

Pihak penjual plat nomor yang ada di Makassar secara usia rata-rata sudah berumur 20-40 tahun. Artinya, jika ditinjau dari segi usia tersebut, mereka sudah masuk dalam katagori baligh. Mereka juga tidak memiliki tanda-tanda gangguan kejiwaan yang bisa mengganggu kelancaran dalam melakukan praktek jual beli. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada pembeli. Jika ditinjau dari segi usia, para pembeli kebanyakan didominasi oleh kalangan usia muda berkisar 20-30 tahun. Terkadang ada diantara mereka yang merupakan suruhan dari orang tuanya untuk memesan plat nomor. Objek dalam jual beli plat nomor ini terbagi ke dalam dua bagian, yakni:

a. Plat Nomor Sesuai TNKB

Plat nomor kendaraan bermotor merupakan ciri atau tanda pengenal suatu kendaraan yang diberikan oleh kepolisian. Setiap plat nomor kendaraan memiliki kombinasi nomor yang berbeda-beda, terdiri dari huruf dan angka. Salah satu ciri identitas plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yaitu pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (*security mark*) cetakan lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda

khusus cetakan "KORLANTAS POLRI" (Korps Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI. Ciri plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian diatas tentu berbeda dengan apa yang dibuat oleh tukang plat nomor di pinggir jalan, namun ada juga yang menggunakan cetakan lambang polisi lalu lintas. Mereka yang tidak menggunakan (*security mark*) meski demikian, keberadaan pelaku usaha dibidang jasa plat nomor tidak dipermasalahan selama pembuatannya sesuai dengan identitas kendaraan yang berlaku.

#### b. Plat Nomor Palsu

Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, keberadaan penjual plat nomor bisa memberikan manfaat tersendiri, terutama pada kondisi-kondisi tertentu disaat pemilik kendaraan belum mendapatkan plat nomor dari pihak kepolisian. Akan tetapi disisi lain, terkadang ada pembeli yang memanfaatkan mereka untuk memalsukan TNKB kendaraan pembeli tersebut. Pemalsuan terhadap TNKB bisa bermacam-macam, seperti memalsukan kode wilayah, nomor registrasi kendaraan, masa berlaku atau bahkan ukuran plat itu sendiri. Tindakan pemalsuan ini tentu bertentangan dengan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 68. Para penjual mengakui bahwa ada saja pembeli yang memesan plat nomor yang dipalsukan. Pemalsuan didominasi pada bagian masa berlaku atau mengganti ukuran plat dari yang seharusnya.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ilyas bahwa:

“Jika ada pembeli yang memesan dengan memalsukan nomor atau masa berlakunya, biasanya saya memberi tahu terlebih dahulu kalau ketahuan atau ada razia dari polisi pasti kena sanksi dan denda”.<sup>63</sup>

Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Aco bahwa:

“Saya sudah bilang sama pembeli kalau jangan palsukan nomornya, nanti kalau ada razia bisa ditangkap. Tapi kadang pembeli tidak menghiraukan himbauan saya, jadi terserah saja”.<sup>64</sup>

Mengambil kesimpulan dari berbagai pandangan di atas menunjukkan bahwa bagi pembeli yang memesan plat nomor untuk dipalsukan, anjuran seperti yang diutarakan penjual atau bahkan aturan yang terdapat dalam UU lalu lintas tidak begitu dihiraukan. Beragam latar belakang menjadi alasan tersendiri bagi seseorang yang melakukan perubahan plat nomor sesuai dengan kemauan mereka. Ada yang mengganti plat nomor dengan alasan kekhawatiran akan sanksi yang bakal dijatuhkan karena plat nomor yang bersangkutan sudah kadaluarsa, ada juga karena selera yang bersangkutan untuk memodifikasi plat nomor.

Selanjutnya tanggapan tentang pertanyaan terkait pihak-pihak tertentu yang mengawasi penjualan plat nomor kendaraan yg mereka jalani. Menurut Bapak Aco pemilik perusahaan:

“Selama saya menjual, tidak ada pihak tertentu yang mengawasi atau mengontrol penjualan saya ini”.<sup>65</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Ilyas bahwa:

---

<sup>63</sup>Iyas (32 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018

<sup>64</sup>Aco (24 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018

<sup>65</sup>Aco (24 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018

“Tidak ada yang mengawasi penjualan saya, tapi terkadang ada oknum polisi mengingatkan untuk tidak memalsukan atau modifikasi plat nomor yg saya jual”.<sup>66</sup>

Bapak Lulu juga menyampaikan bahwa:

“Kalau masalah penjualan plat nomor seperti saya, tidak harus ada yang mengawasi. Selama ini tidak ada pihak-pihak tertentu yang datang untuk mengontrol”.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selama mereka menjual, tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengawasi atau mengontrol penjualan yang dilakukan. Seharusnya, pihak kepolisian rutin mengadakan kunjungan ketempat atau kios penjualan plat nomor. Pihak kepolisian bisa memberikan arahan kepada para penjual untuk tidak memalsukan ataupun memodifikasi plat nomor kendaraan, sekalipun atas permintaan pembeli.

## **2. Pandangan Konsumen**

Interaksi kebutuhan sosial yang berhubungan dengan konsumsi, baik kebutuhan primer ataupun sekunder, manusia sering memilih alat, bahan, dan makanan yang dapat meringankan dirinya. Berikut adalah tanggapan dari beberapa konsumen yang membeli plat nomor kendaraan:

---

<sup>66</sup>Iyas (32 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018

<sup>67</sup>Lulu (35 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018.

Menurut Basrul Mangerangi, sebagai konsumen mengatakan bahwa :

“Kalau tidak ada tukang plat nomor pasti repot. Bikin kepolisi waktunya lama. Sedangkan motor saya jadi alat transportasi yang digunakan tiap hari. Jadi, tukang plat nomor itu sangat membantu sekali”.<sup>68</sup>

Dalam Islam, proses jual beli harus mengedepankan azas manfaat bagi orang lain. Hukum Islam mengharuskan obyek jual beli harus bermanfaat bukan untuk sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang (kemaksiatan, perbuatan dosa, penyembahan kepada selain Allah yang mengarah kepada kemusyrikan).<sup>69</sup> Bagi pembeli yang memesan plat nomor untuk dipalsukan, ada beragam latar belakang menjadi alasan tersendiri bagi seseorang yang melakukan perubahan plat nomor sesuai dengan kemauan mereka.

Muhammad Ilham mahasiswa semester 5 mengungkapkan bahwa:

“Saya cuma mengganti masa berlakunya saja. Seharusnya habis Januari 2016, saya ganti jadi Agustus 2017. Soalnya kalau dari kepolisian lama, apalagi ngurusnya harus pulkam dulu. Polisi juga tidak bakalan tahu kecuali kalau ada razia”.<sup>70</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Usman bahwa:

“Saya hanya mengganti angka 5 dengan menggunakan hurup S. Sekedar variasi aja. Dan nggak terlalu kelihatan juga, kebetulan penaruhannya ada di ujung nomor”.

<sup>68</sup>Basrul Mangerangi (23 Tahun) selaku pembeli, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018.

<sup>69</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 32.

<sup>70</sup>Muhammad Ilham (22 Tahun) selaku pembeli, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2018.

Keterangan narasumber di atas menunjukkan beragamnya latar belakang pergantian plat nomor seseorang. Ada yang mengganti plat nomor dengan alasan kekhawatiran akan sanksi yang bakal dijatuhkan karena plat nomor yang bersangkutan sudah kadaluarsa, ada juga karena selera yang bersangkutan untuk memodifikasi plat nomor. Manajemen kepolisian dalam mengeluarkan plat nomor yang memakan waktu lama membuat masyarakat malas mengurus plat nomor resmi di Samsat untuk kendaraannya. Dari sisi penegakan hukum, pengawasan serta penindakan pemalsuan plat nomor juga belum memberikan efek jera bagi pelakunya.

Teori pertanggungjawaban hukum pidana sikap dari pembeli di atas bukan sebagai bentuk kelalaian, karena pembeli tersebut mengetahui tindakan yang dilakukannya. Terdapat unsur kesengajaan dari pembeli, kesengajaan yang bisa dikategorikan sebagai kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta. 1993), h. 46.

### ***C. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan di Kota Makassar***

Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai hasil keringat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain. Allah SWT memerintakan kepada hambanya agar senantiasa memakan harta yang halal dan baik.

Allah SWT memerintakan kepada manusia untuk senantiasa mencari rezeki yang baik-baik agar mendapatkan manfaat untuk diri dan keluarga kita. Memberikan kebebasan kepada hambanya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Allah menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yng ada didalamnya unuk kepentingan dan manfaat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al- Luqman/31:22, yaitu:

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

“Dan Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan”.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan terjemah*, h. 330.

Maksud dari ayat di atas bahwa orang-orang yang menyerahkan diri kepada aturan Allah, baik dalam permasalahan jual beli dia senantiasa berbuat baik, berlaku jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam hal penjualan. Apalagi dalam jual beli tidak ada di dalamnya komersial melainkan untuk kepentingan ummat.

Proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan untuk komersial demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dia miliki. Setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Muthaffifin /83:1-7, yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri



menghadap Tuhan semesta alam sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin”.<sup>73</sup>

Maksud dari ayat ini bahwa Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat curang dalam hal melakukan usaha jual beli. Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dengan cara baik dan halal. Bekerja dalam Islam diarahkan dalam rangka mencari karunia Allah, yakni untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, sejahtera dan dapat menikmati perhiasan dunia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, pihak penjual plat nomor yang ada di Makassar secara usia rata-rata sudah berumur 25-40 tahun. Artinya, jika ditinjau dari segi usia tersebut, mereka sudah masuk dalam kategori baligh. Mereka juga tidak memiliki tanda-tanda gangguan kejiwaan yang bisa mengganggu kelancaran dalam melakukan praktek jual beli. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada pembeli. Jika ditinjau dari segi usia, para pembeli kebanyakan didominasi oleh kalangan usia muda berkisar 20-30 tahun. Terkadang ada diantara mereka yang merupakan suruhan dari orang tuanya untuk memesan plat nomor.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Islam, orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi persyaratan dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Adapun syarat jual beli yaitu:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Departemen Agama RI *Al Quran dan terjemah*, h. 470.

<sup>74</sup> Imam Mustofa, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.25

- a. Berakal
- b. Baliqh
- c. Tidak mubazir
- d. Atas kehendak sendiri
- e. Milik sendiri
- f. Barang yang halal
- g. Bermanfaat

Pelaku Ijab kabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Kedua belah pihak diatas jika ditinjau dari hukum Islam sudah bisa terpenuhi sebagai pihak yang berakad. Beberapa penjual yang ditemui penulis saat berlangsungnya penelitian, rata-rata usia mereka sudah masuk kepala tiga bahkan lebih. Begitu pula dengan pihak pembeli, bahkan dari mereka kebanyakan anak-anak muda seperti mahasiswa yang secara usia sudah lebih dari 17 tahun. Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS an-Nisaa'/4:5, yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦٥﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>75</sup>

Proses ijab qabul atau *sighat* akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli plat nomor dilakukan pada saat penarikan plat nomor yang sudah jadi dari penjual. Pembeli memberikan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati untuk sebuah plat nomor yang dipesan. Pembayaran yang dilakukan setelah pemesanan (plat nomor) jadi juga berlaku untuk jual beli plat nomor melalui online, telepon dan sms. Pemesanan untuk pembuatan plat nomor melalui online, telepon dan sms biasanya hanya ketika pembuat plat nomor dan pemesan sama-sama kenal. Dalam terminologi Islam, praktek jual beli dengan cara pemesanan barang yang belum jadi bisa dikategorikan ke dalam dua jenis jual beli, yakni jual beli *sâlam* dan jual beli *istishnâ'*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, jual beli plat nomor di Makassar yang dilakukan melalui pemesanan online, telepon dan sms masuk ke dalam kategori jual beli *istishna'*. *Istishna'* merupakan suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu yang

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemah*, h. 61.

bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat atau produsen).<sup>76</sup> Plat nomor menjadi barang yang harus ditanggung oleh penjual baik dari sisi bahan maupun pengerjaannya.

Kategori *istishna'* dalam jual beli plat nomor setidaknya bisa dilihat dari perbedaan konsep *istishna'* dengan *salam* sebagai berikut: a) Objek *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi terlebih dahulu maupun tidak. b) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan juga dapat dicicil atau dapat dibayar dibelakang. c) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai produksi.<sup>77</sup>

Ungkapan akad atau ijab kabul sebagai pertanda kesepakatan jual beli direalisasikan dalam bentuk yang berbeda. Tidak ada bahasa atau tanda tertentu. Masing-masing penjual memiliki cara dalam melakukan akad ketika melangsungkan proses jual beli dengan para pembeli. Pihak pembeli datang dan memilih-milih dagangan yang dijual kemudian setelah mendapatkan barang yang cocok, maka terjadilah tawar menawar sampai mencapai mufakat dari kedua belah pihak. Dalam jual beli plat nomor kendaraan juga tidak ada perjanjian khiyar diantara penjual dan pembeli, karena sebelum terjadi transaksi jual beli berlanjut pembeli sudah diberi

---

<sup>76</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), h. 631.

<sup>77</sup>Erdi Marduwira, Akad *Istishna'* dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal*. Tidak diterbitkan. h. 38.

kesempatan untuk meneliti dan memeriksa plat nomor yang akan mereka ambil setelah dibuatkan.

Bahasa pasar seperti yang dilakukan antara penjual dan pembeli plat nomor mengandung pengertian yang cukup sederhana. Ketika telah berlangsungnya proses jual beli, maka antara pedagang dan pembeli saling mengucapkan terimakasih. Kata-kata “terimakasih” ini sudah memberi pemahaman bahwa kedua belah pihak telah menyepakati kondisi barang (plat nomor) yang diperjualbelikan, baik itu terkait harga maupun jenis atau kualitasnya. Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*sighat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat ataupun korespondensi.

Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuannya. Terkadang, akad juga bisa dikatakan sah walaupun tanpa diungkapkan dengan ucapan atau lafadz tertentu. Akan tetapi, dilakukan dengan tindakan oleh kedua belah pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Transaksi ini lazim dikenal dengan *ba'i almu'āthāh*, yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan/keridhaan, tanpa diucapkan ijab qabul.<sup>78</sup>

Islam tidak melarang kebiasaan masyarakat seperti dalam pelaksanaan ijab qabul di atas karena tidak bertentangan dengan syari'at. Dalam Islam, praktek akad yang tergambar dari proses jual beli plat nomor kendaraan tersebut, disebut dengan *al-'Urf al-fi'li* (dalam istilah lain disebut sebagai *al-'Urf alamali*) adalah sejenis

---

<sup>78</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), h. 52.

pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Akad menjadi sebuah ikatan atau pertalian antara penjual dan pembeli terhadap objek yang mereka perjualbelikan. Keberadaan akad akan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli. Allah SWT berfirman mengenai pentingnya sebuah akad dalam QS Al-Maidah/5:1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>79</sup>

Jual beli merupakan sebuah perikatan, yang di dalamnya selalu berkaitan dengan para pihak yang melakukan perikatan tersebut dan para pihak juga merupakan salah satu unsur yang menjadikan jual beli menjadi sempurna. Selain para pihak yang termasuk, rukun jual beli ialah adanya suatu obyek yang diperjualbelikan dan adanya *sighat* akad yaitu ijab kabul.

Menurut pendapat ulama’ Hanafiyah rukun akad hanyalah ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan kehendak pihak pertama, sedangkan kabul ialah pernyataan kehendak dari pihak kedua. Apabila sudah terjadi ijab dan qabul pastilah ada orang

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemah*, h. 84.

yang melakukan akad dan juga obyek yang diakadkan.<sup>80</sup> Prosedur serta aturan-aturan dalam Islam mengenai pihak, objek serta transaksi dalam jual beli memiliki tujuan agar aktifitas ekonomi menjadi sesuatu yang mulia dan menjadi sebuah kegiatan ibadah yang akan dibalas pahala oleh Allah SWT. Oleh karena itu, syarat dan rukun hendaklah dipenuhi dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti jual beli.

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam transaksi jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

Kios menjadi majlis atau tempat berlangsungnya pelaksanaan akad jual beli. Majlis (kios pembuatan plat nomor) menjadi tempat proses tawar menawar atau bahkan komplain terkait proses jual beli. Dalam jual beli plat nomor ini, tidak ada perjanjian khiyar diantara penjual dan pembeli. Sebelum terjadi transaksi jual beli berlanjut pembeli sudah diberi kesempatan untuk meneliti dan memeriksa plat nomor yang akan mereka ambil setelah dibuatkan. Orang yang melakukan akad jual beli

---

<sup>80</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 45.

haruslah tidak ada paksaan atau dengan kata lain harus berlandaskan atas rasa suka sama suka. Hal ini dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS. An-Nisaa'/4: 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>81</sup>

Plat nomor kendaraan yang diperjualbelikan di Makassar bisa langsung diserahkan kepada pembeli, karena plat nomor tersebut sudah ada ditangan penjual pada saat pembeli dan penjual melangsungkan akad jual beli. Plat nomor kendaraan yang diperjualbelikan juga yang sudah dipilih oleh pembeli, sehingga plat nomor kendaraan tersebut langsung dapat diserahkan kepada pembeli. Ditinjau dari sisi penyerahterimaan, Islam mengharuskan seseorang yang menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada orang yang membeli adalah tidak sah. Misalnya ikan yang masih di laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya dan barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Selain katagori-katagori di atas, objek yang diperjualbelikan (plat nomor) juga merupakan barang yang diperbolehkan dalam Islam.

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemah*, h. 65.



Plat nomor bukan termasuk barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan. Menurut ketentuan syara' barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak. Selain itu, obyek dari jual beli juga harus memenuhi unsur kemaslahatan. Islam melarang adanya unsur penipuan. Jika hal itu terjadi maka akad yang dilakukan dikategorikan ke dalam akad yang *fasad*. Objek jual beli yang berupa plat nomor menjadi hal penting dalam melakukan analisis menurut tinjauan hukum Islam.

Landasan transaksi jual beli dalam Islam dibangun atas dasar maslahat. Syara' tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kedzaliman di dalamnya, seperti penipuan, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara kedua belah pihak.<sup>82</sup> Pemalsuan terhadap TNKB tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut telah melanggar UU nomor 22 tahun 2009, tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk penipuan. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama islam karena merugikan masyarakat diantaranya sebagai berikut.<sup>83</sup>

1. Memperjual belikan barang-barang yang haram
2. Jual beli barang untuk mengacaukan pasar
3. Jual beli barang curian
4. Jual beli dengan syarat tertentu
5. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

---

<sup>82</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 120.

<sup>83</sup>Imam Mustofa, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.28

6. Jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam

Alasan pembeli plat nomor agar terhindar dari sanksi UU lalu lintas tidak bisa dibenarkan. Aspek kejujuran dan moralitas dalam bermuamalat menentukan sehatnya dunia bisnis. Akan tetapi, bagi sebagian pihak adanya etika dalam bisnis hanya sebagai penghalang dalam memperoleh keuntungan, sehingga cara apapun dilakukan oleh mereka untuk meraup keuntungan. Islam sangat menentang ketidakjujuran, kecurangan dan penipuan apalagi yang bisa merugikan ketertiban dan undang-undang. Dalam Islam, tidak ada larangan dalam melakukan aktifitas jual beli. Akan tetapi jual beli tersebut bisa menjadi hal yang diharamkan ketika di dalamnya mengandung unsur kecurangan, melakukan penipuan atau pemalsuan.

Pada ketentuan hukum, konsep Islam mengenal istilah *Haram lighairihi* yaitu bukan disebabkan oleh barang dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya, awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Jual beli plat nomor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan, akan tetapi karena adanya unsur pemalsuan yang jelas dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, mengganggu ketertiban identitas berkendara serta mengecoh pihak kepolisian, hal tersebut tentu tidak dibenarkan.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada BAB IV maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli plat nomor yang diperbolehkan yaitu penjualan plat nomor yang sesuai dengan identitas TNKB. Proses jual beli diperbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan. Selain itu, objek merupakan barang yang bukan najis dan diharamkan oleh Islam, jual beli harus mengandung unsur kemanfaatan. Penjual telah membantu pembeli untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar UU lalu lintas, yakni ketiadaan plat nomor dalam kendaraan. Dalam Islam, asas utama dalam jual beli adalah sebuah kemaslahatan.
2. Jual beli plat nomor yang dilarang yaitu jual beli plat nomor dengan identitas yang dipalsukan. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur pemalsuan atau penipuan. Pada ketentuan hukum, konsep Islam mengenal istilah Haram *lighairihi*, yakni bukan disebabkan oleh barang yang dzatnya haram. Keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain, sebenarnya ia termasuk yang halal tapi karena adanya penyebab lain ia menjadi haram. Jual beli plat nomor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan, akan tetapi karena adanya unsur pemalsuan yang jelas dilarang oleh UU yang berlaku di Indonesia, mengganggu ketertiban

identitas berkendara serta mengecoh pihak kepolisian hal tersebut tentu tidak dibenarkan.

### **B. Saran**

Jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Makassar masih menyisakan beberapa catatan penting, terutama demi tegaknya aturan yang berlaku dalam undang-undang berlalu lintas. Disisi lain, secara hukum Islam proses jual beli patut mendapatkan perhatian. Adapun saran yang didasarkan pada proses dan hasil penelitian terdapat beberapa hal, yaitu:

1. Bagi pihak kepolisian, penegakan hukum terhadap pelanggaran pengguna TNKB harus betul-betul membuat efek jera. Diperlukan pengecekan rutin agar pengguna kendaraan lebih memiliki kesadaran akan peraturan lalu lintas.
2. Pembuatan TNKB di samsat juga seharusnya bisa lebih cepat dikeluarkan bagi pemilik kendaraan bermotor. Perlu dipertimbangkan kerjasama pihak kepolisian dengan para pelaku usaha dibidang pembuatan plat nomor.
3. Bagi penjual plat nomor, aturan serta undang-undang yang berlaku, harus menjadi patokan dalam melayani pembeli. Jika tidak bisa mengelak atas pesanan pembeli untuk memalsukan plat nomor, tidak ada salahnya jika mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian.
4. Bagi pemilik kendaraan, sudah seharusnya menjadi warga negara yang taat hukum dengan cara mematuhi seluruh peraturan mengenai identitas kendaraannya dan tidak memalsukan plat nomor yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*, diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil, Cet. III, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007.
- Al-Nawawi, Imam, Raudhah al-Thalibin wa' Umdah al-Muftin, *Digital Library*, al-Maktabah al- Syamilah al- Isdar al-Sani, 2005.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Ayyub, Hasan, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aziz, Muhammad Rusydi, *Bai Istishna'*, [https : // syafaatmuhari .wordpress .com /2011 / 07/03/ bai%E2%80%99 – Istishna%E2%80%99/](https://syafaatmuhari.wordpress.com/2011/07/03/bai%E2%80%99Istishna%E2%80%99/), (9 maret 2018)
- Bungin, Burhan, “*Penelitian Kualitatif*“, cetakan. II, Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Agama, *Al Quran dan terjemah*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Djakfar Muhammad, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Djamili, R Abdul, *Hukum islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Djuwaini, Dimajuddin, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 2003.
- Hasan, M Ali, *Mashail Fiqhiya: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* cet. Ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Huberman, Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Cet, I, Jakarta UI Press, 1992.

- Kementrian Agama. 2012. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta. Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Kuncoro Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Lubis, Suhrawardi K, Farid Wajdi, *Hukum ekonomi islam*, Jakarta; sinar grafika, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Marduwira, Erdi, Akad Istishna' dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri), *Jurnal*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Tidak Diterbitkan.
- Moeleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2000)
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1986.
- Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *fiqh Sunnah* diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Siswanto, Fritz Kleinsteuber, *Strategi Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Damar Media Pustaka, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Cet 1, Citra Umbara, Bandung.

Usman, Husaini dan PurnomoSetiady Akbar, *Metode Peneltian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Ya'kub Hamzah, *Etika Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1991.  
<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/etika-jual-beli-dalam-ekonomi-islam>, diakses pada (28 september 2017).

Zuhaili, Wahbah, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu, al-juz al-khamis*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.'





*LAMPIRAN*

---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



*LAMPIRAN 1*



*PEDOMAN WAWANCARA*

---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## MANUSKRIP WAWANCARA

Nama Informan :

Usia :

Pekerjaan :

Agama :

Pendidikan terakhir :

Alamat :

Terima kasih sebelumnya karena Bapak/Ibu sudah meluangkan waktunya, di tengah rutinitas dan kesibukan Anda hari ini.

### ***Daftar pertanyaan untuk penjual plat nomor kendaraan:***

1. Sudah berapa lama Anda berjualan plat nomor kendaraan?
2. Apa alasan Anda membuka usaha penjualan plat nomor kendaraan?
3. Bagaimana minat pembeli terhadap plat nomor kendaraan yang Anda jual?
4. Model plat nomor apa saja yang Anda tawarkan ?
5. Bagaimana cara pemesanan dan sistem pembayaran plat nomor kendaraan yang Anda jual?
6. Bagaimana akad jual beli yang Anda lakukan?
7. Apakah kejelasan kendaraan pembeli sesuai dengan STNK?
8. Apakah Anda memiliki surat izin untuk melakukan penjualan plat nomor kendaraan tersebut?

9. Apakah ada dari pihak-pihak tertentu yang selalu mengontrol atau mengawasi penjualan plat nomor kendaraan yang Anda lakukan?
10. Bagaimana dengan perkembangan ekonomi bapak/ibu setelah menjual plat nomor kendaraan tersebut?

***Daftar pertanyaan untuk pembeli:***

1. Kenapa Anda memilih membeli plat nomor kendaraan di pinggir jalan?
2. Bagaimana tanggapan Anda dengan kehadiran penjual plat nomor kendaraan di pinggir jalan?
3. Bagaimana perbandingan antara membeli/membuat plat nomor kendaraan di pinggir jalan dengan plat nomor kendaraan dari samsat?
4. Apakah anda siap menanggung resiko atas pemalsuan plat nomor kendaraan yang Anda gunakan?

*LAMPIRAN 2*

*DOKUMENTASI*

---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

1. Bapak Lulu selaku penjual plat nomor



**2. Bapak Ilyas selaku penjual plat nomor**



**3. Bapak Aco selaku penjual plat nomor**











1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 1 7 1 4 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 16945/S.01P/P2T/12/2017  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Walikota Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 7018/EB.II/PP.00.9/2017 tanggal 22 November 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ADRIASYAH ARIFIN S**  
Nomor Pokok : 10200113180  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PANDANGAN EKONOMI ISLAM TENTANG JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 15 Desember 2017

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peninggal.

SIMAP PTSP 18-12-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://p2tbkpmdu.sulselprov.go.id> Email : [p2t\\_provsulsel@yahoo.com](mailto:p2t_provsulsel@yahoo.com)  
**Makassar 90222**





Nomor **7577/EB.I/PP.00.9/2017**  
Lamp  
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata, **21** Desember 2017

Kepada,

**Yth. Kepala UPT P2T BKPM**

Di –

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama	: <b>Amri</b>
NIM	: 10200113181
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: ekonomi Islam
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Skarda

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya **"Penerapan Model gadai sawah (massanra galung) dalam prespektif Ekonomi Islam di dusun bocco bocco e desa wecudai kec. Pammana Kab. Wajo"**

Dengan Dosen pembimbing:

- 1. Dr. Ir. Idris Parakassi, MM**
- 2. Jamaluddin M, SE., M.SI**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Dsn. Bocco boccoe Pammana Kab. Wajo**.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

Dekan,

**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**

**NIP. 19581022 198703 1 002**

Tembusan :

1. *Rektor UIN Alauddin Makassar di SamataGowa*
2. *Mahasiswa yang bersangkutan*
3. *Arsip*



## **RIWAYAT HIDUP**

ADRIANSYAH ARIFIN. S, dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 2 Juni 1995. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, buah hati dari Ibunda Nanti Yaqub dan Ayahanda Suwaedi Paserangi. Penulis memulai pendidikan di TK Al-Amanat Bulukumba pada tahun 2000 dan melanjutkan pendidikan ke SD Inpres Tello Baru 2 Makassar pada tahun 2001. Penulis tamat sekolah dasar pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan ke MTsN Model Makassar pada tahun 2001, penulis tamat tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MAN 2 Model Makassar, hingga tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.

